



Peran *Keuchik* Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Muhammad Junaidi

Universitas Iskandar Muda

mhdjunabdullah@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

10 Juni 2022

Disetujui :

20 Juni 2022

Dipublikasikan :

25 Juni 2023

ABSTRAK

Partisipasi politik sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama pimpinan *gampong* dalam hal ini *keuchik* dan masyarakat dalam rangka keikut sertaannya dalam politik. Namun disisi lain *keuchik gampong* merasa serba salah ketika dekat dengan partai politik atau Calon Anggota Legislatif karena dianggap memanfaatkan jabatannya dalam pemilihan anggota legislatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kendala *Keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik pada *Keuchik Gampong Tumbo Baro* dan *Gampong Lam Ara Cut* Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan serta Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran *Keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014 pada *Gampong Tumbo Baro* dan *Gampong Lam Ara Cut* Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar berjalan dengan baik dan netral baik dari segi pendidikan politik padaarganya maupun sosialisasi bahkan diskusi dengan melibatkan tokoh politik yang netral.

Kata kunci: Peran *Keuchik*; Partisipasi Politik; Anggota Legislatif; Kesadaran Politik

ABSTRACT

Political participation is very important in an effort to increase people's political awareness, therefore it requires the cooperation of village leaders in this case the keuchik and the community in the context of their participation in politics. But on the other hand, the village keuchik feels awry when he is close to a political party or legislative candidate because he is considered to be utilizing his position in the election of legislative members. The purpose of this study is to determine and analyze the role and obstacles of Keuchik in increasing political participation in Keuchik Gampong Tumbo Baro and Gampong Lam Ara Cut, Kuta Malaka District, Aceh Besar Regency in increasing community political participation in the 2014 Legislative Election. The approach used in this research is qualitative, while data collection techniques are carried out through observation and in-depth interviews with informants and documentation. The results showed that the Keuchik's role in increasing community political participation in the 2014 Legislative Elections in Gampong Tumbo Baro and Gampong Lam Ara Cut, Kuta Malaka District, Aceh Besar Regency went well and was neutral both in terms of political education to its citizens and socialization and even discussions involving neutral political figures.

Keywords : *Role of Keuchik; Political Participation; Legislative Members; Political Awareness*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan alat menuju tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia selama ini, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen bersama antara para birokrat dan rakyat. Tidak seharusnya politik dijadikan alat oleh para elit politik hanya sebagai sarana untuk mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi maupun kelompok yang menjadikan semakin jauhnya kesejahteraan bagi masyarakat dan hanya menjadikannya bayangan semu.

Kehadiran partai politik dalam pemerintahan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan birokrasi pemerintahan. Salah satu pengaruhnya adalah birokrasi pemerintahan terkontaminasi terhadap

bermacam-macam dan beragam perbedaan ideologi yang dibawa oleh partai politik. Apabila di amati perjalanan birokrasi, maka netralitas birokrasi pemerintah dari pengaruh kekuasaan partai politik belum pernah terwujud. Seringkali para birokrat terjun dalam kancah politik, hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak etis manakala birokrat yang bertugas sebagai pelayan administrasi masyarakat juga terlibat kancah politik. Sehingga masyarakat kurang mendapatkan layanan secara adil dan merata, sebagaimana fungsi dan tugas dari birokrasi tersebut.

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali di Indonesia sebagai sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilu menjadi cerminan suara rakyat dalam menentukan keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan sebuah bangsa. Pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi yang memberi apresiasi pada masyarakat dalam menentukan hak politiknya.

Pemilihan umum sebagai sebuah momentum yang tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada Lembaga Legislatif. Pemilihan umum merupakan harapan sekiranya masyarakat mau berpartisipasi aktif pada pemilihan sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Pemilihan umum anggota legislatif merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Suara-suara inilah yang akan diwadahi oleh partai politik yang mengikuti pemilu menjadi wujud wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, DPRD Pripinsi dan Kabupaten Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pada tahun 2014 yang lalu bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum untuk kesebelas kalinya. Pelaksanaan pemilu secara periodik menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem negara demokrasi. Sejak Pemilihan Umum tahun 1999 Indonesia telah dianggap sebagai negara terbesar ketiga yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Pemilihan umum ini menjadi wahana aspirasi politik rakyat Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu juga menjadi ajang paling massif, bebas, dan adil untuk menentukan partai dan tokoh yang berhak mewakili rakyat. Dalam sistem perwakilan, tak ada cara lain yang paling absah untuk memilih para wakil rakyat kecuali melalui pemilu.

Pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Besar merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasib masyarakat dan bangsa untuk masa depan, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik dan harus dikelola oleh orang-orang yang bertanggungjawab serta memiliki integritas, profesional dan akuntabilitas tinggi. Untuk itu pemerintah di tingkat *gampong* dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih aktif dalam pendekatan, sosialisasi dan partisipasi untuk mendorong dan memberi penyadaran kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik.

Partisipasi politik sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama pimpinan *gampong* dalam hal ini *keuchik* dan masyarakat dalam rangka keikut sertaannya dalam politik. Partisipasi politik masyarakat pada dasarnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat yang lazim dilakukan oleh organisasi sosial politik, keluarga ataupun pribadi.

Partisipasi politik masyarakat bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi politik yang diusahakan secara sadar dan terencana yang bersumber dari aspirasi yang digali dari kepribadian. Partisipasi politik masyarakat yang baik akan dapat mengatasi segala kemungkinan bahaya dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Partisipasi politik masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam memberi hak pilih untuk dalam pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, peraturan ini memberi peluang bagi daerah untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Sehingga institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri.

Kepemimpinan didalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat strategis, begitu juga kepemimpinan seorang *keuchik* dalam sebuah *gampong* dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah serta memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat *gampong* dalam setiap pengambilan keputusannya. Sebagai pemimpin, seorang *keuchik* bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur *gampong*, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat *gampong*. Konsep kepemimpinan *keuchik gampong* menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Keuchik merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan yang berada ditingkat *gampong* dan dibantu oleh beberapa orang perangkat *gampong* lainnya dalam melaksanakan roda pemerintahan. *Keuchik* memiliki tugas untuk mengembangkan potensi masyarakat. Dan anggota masyarakat perlu diberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tanggungjawabnya *Keuchik* dalam mengayomi masyarakat. *Keuchik* juga berperan dalam mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan gotong royong maupun partisipasi politik berupa ikut serta memberikan hak suara di TPS.

Semenjak reformasi hingga sekarang arah birokrasi Indonesia belum sepenuhnya lepas dari politik dan kekuasaan. *Keuchik gampong* merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat *gampong* serta sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan *gampong* menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok *keuchik gampong* sebagai elit lokal yang dianggap sangat berpengaruh atau memiliki peran besar dalam masyarakat, didekati oleh semua partai politik dan sebahagian besar Calon Anggota Legislatif (Caleg) dalam pemilu legislatif.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah *gampong*, sering terdapat *keuchik gampong* terlibat politik praktis dengan berpihak pada salah satu partai politik atau salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg). *Keuchik* berperan sebagai penggerak politik masyarakat serta terlibat dalam memobilisasi massa pada saat kampanye. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik.

Dengan keterlibatan *keuchik gampong* dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir, sehingga akan menimbulkan anggapan tersendiri terhadap keterlibatan atau keberpihakan *keuchik gampong* dalam politik. Namun disisi lain *keuchik gampong* juga merasa serba salah ketika dekat dengan semua partai politik atau Calon Anggota Legislatif (Caleg), *keuchik* dianggap memanfaatkan jabatannya dalam pemilihan anggota legislatif.

Hal tersebut sebagai fenomena politik yang tidak bisa dipisahkan dengan peran *keuchik* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pemilu dianggap sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di *Gampong Tumbo Baro* dan *Gampong Lam Ara Cut* berupa pemilu legislatif secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di Kabupaten Aceh Besar.

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa tepatnya pasal 26 ayat 2, dalam rangka memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya berkaitan dengan proses demokrasi, maka *keuchik* berperan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat baik melalui sosialisasi, maupun melalui ajakan-ajakan untuk keterlibatan dalam menggunakan hak pilih pada pemilu, mengingat selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi. Masyarakat desa memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahunan, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa. Masyarakat *gampong* harus bisa melakukan partisipasi politik dengan dasar pemahaman yang jelas akan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik anggota masyarakat, maka perlu adanya peran *keuchik* dalam membina dan tanggap terhadap kondisi politik serta bersikap netral dalam pelaksanaannya. Namun *keuchik* juga dihadapkan pada berbagai keadaan dan tantangan dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Hasil penelitian Halimun Ginanjar (2014) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif sekitar 85%. Adapun kaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 2014, namun bedanya pada teknik penentuan informan.

Hasil penelitian Nufal Badri (2014) menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya Kiai mengedepankan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan mengedepankan serta memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran tokoh dalam meningkatkan partisipasi politik, namun bedanya kalau penelitian diatas melihat peran Kiai maka penelitian yang penulis lakukan melihat tentang peran *Keuchik Gampong* dari perspektif yang berbeda. Kemudian penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, begitu juga halnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran dan kendala *Keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di *Gampong Teumbo Baro* dan *Gampong Lam Ara Cut* Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan peran *keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di *Gampong Tumbo Baro* dan *Gampong Lam Ara Cut* Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan kualitatif digunakan karena cukup representatif dalam menggambarkan fenomena yang menjadi objek penelitian, mengingat penelitian sebagai suatu upaya sistematis dalam menemukan, menganalisis dan menafsirkan bukti-bukti empirik untuk memahami gejala-gejala atau untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan yang terkait dengan gejala tersebut.

Menurut Sugiyono (2010: 38) Fokus penelitian adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan gejala yang menjadi objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pariwisata Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Pendidikan politik warga

Berkaitan dengan pendidikan politik warga masyarakat *Gampong Tumbo Baro* dan juga masyarakat *Gampong Lam Ara Cut* cukup memadai, hal ini diyakini bahwa pendidikan politik diberikan sebagai bagian dari pembinaan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Dalam hal ini tentunya diharapkan keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif, dengan cara menggunakan hak pilih yang telah diberikan, terutama bagi generasi muda atau pemilih pemula yang belum berpengalaman.

Pendidikan politik di *Gampong Tumbo Baro* dan di *Gampong Lam Ara Cut* bertujuan untuk menciptakan kesadaran bagi anggota masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan aturan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat *Keuchik Gampong Tumbo Baro* mengenai pendidikan politik yaitu:

Pendidikan politik kita sampaikan pada warga masyarakat dengan tujuan agar mereka atau kita semua sadar akan hak dan kewajiban untuk memilih serta adanya tanggungjawab masyarakat terhadap bangsa melalui partisipasi dalam pemilu tentunya dalam pemilihan anggota legislatif. Dan juga sadar serta taat pada peraturan yang berlaku sekaligus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan ikut serta berpartisipasi aktif sekaligus mendukung sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, jangan karena beda pendapat, beda sikap bahkan beda pilihan sehingga terjadi perpecahan atau masalah baru dalam gampong, itulah pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat. (Hasil wawancara dengan *Keuchik Tumbo Baro* tanggal 28 Desember 2016).

Hal yang sama, namun dengan kata-kata yang berbeda juga di ungkapkan oleh Sekretaris *Gampong Lam Ara Cut* yaitu:

Pendidikan politik sangat penting bagi warga masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan juga bermasyarakat. Seluruh anggota masyarakat bisa berpartisipasi dan bisa menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab secara etika dan moral. Dan jangan karena berbeda pandangan atau berbeda pilihan dijadikan sebagai keributan dalam masyarakat. Jadi pendidikan politik ini diberikan agar masyarakat memahami substansi dari pemilihan anggota

legislative yang terpilih tentunya menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam mengawal serta menyampaikan aspirasi masyarakat. (Hasil wawancara dengan Sekdes Lam Ara Cut 29 Desember 2016).

Dari dua pendapat tersebut di atas, pendidikan politik sangat diperlukan bagi anggota masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut, agar tidak terjadi perpecahan akibat dari perbedaan pandangan atau pilihan dalam pemilihan anggota legislatif. Dalam hal ini baik *Keuchik* *Gampong* Tumbo Baro maupun *Keuchik* *Gampong* Lam Ara Cut, tidak memberikan pendidikan politik pada warganya masing-masing secara formal, melainkan pendidikan politik disampaikan secara tidak formal dan berulang kali, baik di diwarung kopi maupun di *menasah*.

Sementara *Keuchik* *Gampong* Lam Ara Cut menyatakan “pendidikan politik yang dimiliki warganya sangat kurang, mereka tidak memerlukan teori yang penting orang yang mereka inginkan dari partai tertentu harus menang bagaimanapun caranya”. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua *Tuha Peut* *Gampong* Lam Ara Cut “masyarakat kami masih ikut-ikutan dalam memilih dan pada saat pemilu legislatif tahun 2014 semacam belum bisa menerima perbedaan dalam hal pemilihan, artinya kalau ada perbedaan pilihan dengan dianggap sebagai lawan padahal kawan”.

Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi warga masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik oleh kelompok dalam masyarakat, maupun yang diprogramkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dapat dikatakan tinggi. Terutama partisipasi dalam pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu, dimana anggota masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut berpartisipasi memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan.

Sementara berkaitan dengan faktor utama yang menyebabkan anggota masyarakat mau dengan sukarela berpartisipasi dalam pemilu legislatif dikarenakan anggota masyarakat kedua *gampong* tersebut memiliki calon tersendiri yang ingin dipilih. Masyarakat di lokasi penelitian sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Disamping itu, kondisi religius masyarakat masih sangat kuat, dan warga masyarakat merasa memiliki dan menyadari tentang manfaat yang dirasakan, serta merasa tidak nyaman bila tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif.

Dengan adanya peran *keuchik* dalam hal pendidikan politik warga masyarakat sangat berguna bagi masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut untuk mewujudkan pemilihan anggota legislatif secara demokratis, dan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan membawa dampak positif bagi kemajuan *gampong*. Uraian tersebut sejalan dengan konseptual Danim (2004: 56) tentang peran dan kepemimpinan *keuchik* yaitu “setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Berkaitan dengan pendidikan politik maka warga masyarakat dapat melaksanakan pemilu legislatif sesuai dengan ketentuan. Pendidikan politik dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam menentukan pilihan.

Sosialisasi

Sebagai tahapan dalam pelaksanaan pemilu legislatif, sosialisasi merupakan hal yang sangat diperlukan dan dikedepankan sebagai bagian dari peran seseorang yang terlibat dalam program tersebut. Mukti dalam Salim (2014: 142) mengkaji bahwa “seseorang atau masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya”. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert dalam Salim (2014: 143) menggambarkan “Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya setempat”. Sementara Elder dalam Salim (2014: 144) memperluas pengenaan peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “*live Course*” yang artinya:

Setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebahagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun.

Dalam melaksanakan perannya, *keuchik* harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan statusnya sebagai pemimpin dalam masyarakat. Oleh karenanya maka peran yang dimaksud dalam

pembahasan ini adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seorang pemimpin atau *keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan dengan tetap bersifat netral dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif sesuai dengan tupoksinya.

Dalam hal sosialisasi politik, baik di *Gampong Tumbo Baro* maupun di *Gampong Lam Ara Cut* untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, peran *keuchik* hanya sebatas memberi taukan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan nasehat-nasehat agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, terutama pada panitia pemilihan ditingkat *gampong*. Selanjutnya panitia atau KPPS yang lebih berperan sejak sosialisasi sampai pencoblosan.

Hal tersebut sebagaimana pendapat *Keuchik Gampong Tumbo Baro* “berkaitan dengan sosialisasi kami tidak memiliki peran yang berarti, sebab dalam hal sosialisasi itu merupakan kapasitas ketua dan anggota KPPS yang telah dibentuk”. Hal serupa juga diutarakan oleh *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* bahwa “sosialisasi langsung dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat *gampong*, sementara *keuchik* hanya berperan dalam hal memberikan izin tempat dan waktu kepada anggota KKPS, dan sebagai *keuchik* tentunya tidak bisa mempengaruhi pemilih secara langsung”.

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada perbedaan tentang peran *Keuchik Gampong Tumbo Baro* dengan peran *Keuchik Gampong Lam Ara Cut*, begitu juga dengan karakteristik pemilih sama antara masyarakat *Gampong Tumbo Baro* dengan masyarakat *Gampong Lam Ara Cut*.

Diskusi terbuka elemen masyarakat dengan tokoh politik

Dalam rangka menjaga netralitas sebagai pemimpin di tingkat *gampong*, baik *Keuchik Gampong Tumbo Baro* maupun *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* melakukan diskusi terbuka dengan tokoh politik, dengan harapan anggota masyarakat dapat berkontribusi paling tidak pada saat pemilihan turut memberikan hak suara sesuai dengan keyakinan atau hati nurani masing-masing anggota masyarakat.

Dalam hal ini *Keuchik Gampong Tumbo Baro* lebih kreatif melakukan diskusi politik dengan mengundang pihak lain atau tokoh yang dianggap netral untuk melakukan diskusi mengenai politik dengan masyarakat. Sementara itu *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* tidak mengundang tokoh politik. Hal ini sebagaimana penuturan Ketua *Tuha Peut Gampong Tumbo Baro* berikut ini:

Keuchik Gampong Tumbo Baro dalam rangka meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakatnya, beberapa kali mengundang pihak luar untuk berdiskusi secara terbuka dengan masyarakat, adapun pihak luar yang di undang seperti tokoh pemuda KNPI, mereka memberi pencerahan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif, dan tidak mengajak untuk memilih salah satu calon, melainkan mereka memperkenalkan semua calon anggota legislatif kepada masyarakat, keputusannya ada ditangan pemilih. (Hasil wawancara dengan ketua *tuha peut* 30 Desember 2016).

Sedangkan *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* tidak pernah mengundang tokoh politik dari luar untuk berdiskusi dengan masyarakat. Menurut *Keuchik Lam Ara Cut* “tidak mengundang tokoh politik karena khawatir nantinya tokoh tersebut tidak netral atau orang yang dianggap netral belum tentu diterima oleh masyarakat, karena kondisi masyarakat *Gampong Lam Ara Cut* pada saat itu sedikit berbeda”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan peran antara *Keuchik Gampong Tumbo Baro* dengan *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* pada pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu. Namun demikian kedua *Keuchik Gampong* tersebut mempunyai andil yang besar dalam menyelesaikan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014. Baik *Keuchik Gampong Tumbo Baro* maupun *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* sama-sama sudah memberikan kontribusi dan partisipasi sesuai dengan perannya sebagai pemimpin di tingkat yang paling bawah. Dan hal tersebut bagian dari tanggungjawab moral sebagai pemimpin masyarakat untuk mensukseskan pemilihan anggota legislatif.

Diskusi terbuka antara elemen masyarakat dengan tokoh politik yang netral di *Gampong Tumbo Baro* difasilitasi oleh *keuchik*. Sedangkan *Keuchik Gampong Lam Ara Cut* tidak melakukan diskusi politik karena situasi dan kondisi. Adanya perbedaan antar pemimpin di dua lokasi penelitian berkaitan dengan diskusi dengan tokoh politik. Pendidikan politik dapat mengarahkan masyarakat dalam menentukan hak pilih, bila *Keuchik gampong* bersikap netral dalam menjalankan perannya, meskipun tidak mengundang tokoh politik dari luar untuk melakukan diskusi.

Kendala-Kendala Internal Yang Dihadapi Tingkat pemahaman masyarakat

Sehubungan dengan peran *keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 di *Gampong* Teumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi persoalan adalah kemampuan atau tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu legislatif.

Hal tersebut sebagaimana penuturan seorang informan dari *Gampong* Tumbo Baro yaitu:

Pada Pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu masyarakat *gampong* kami semacam tak peduli tentang pemilu, atau dalam bahasa lain tidak peduli keadaan dengan anggapan untuk apa kita sibuk mengikuti sosialisasi dan juga kampanye, sementara kehidupan kita tetap seperti ini dari tahun-ketahu. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Namun pada saat pemilihan warga masyarakat hadir dan memberikan hak pilihnya. (Hasil wawancara tanggal 30 Desember 2016).

Hal yang serupa namun dengan bahasa yang berbeda juga di utarakan oleh informan lain dari *Gampong* Lam Ara Cut sebagai berikut:

Masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut sebahagian besar tidak memahami dan tidak mau tau tentang tahapan pemilu legislatif pada tahun 2014 yang lalu, mereka beranggapan bahwa yang penting hari pemilihan hadir dan memilih orang yang dikenal, dan disukai yang menjadi calon legislatif dari partai tertentu, kalau yang lain tidak mau tau. Hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat pendidikan secara umum rendah dalam masyarakat *Gampong* kami yaitu Lam Ara Cut. (Hasil wawancara tanggal 30 Desember 2016).

Sementara *Keuchik Gampong* Tumbo Baro mengatakan bahwa “secara umum digampong kami tingkat pemahaman masyarakat tentang pemilu kurang, namun mereka tetap ikut pada saat pemilihan”. *Gampong* Tumbo Baro dengan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut sedikit berbeda namun tidak ada persoalan yang berarti. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat *Gampong* Tumbo Baro lebih tinggi secara umum bila dibandingkan dengan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentunya berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif.

Kesibukan masyarakat

Kesibukan anggota masyarakat dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif, hal tersebut disebabkan anggota masyarakat tidak mengikuti tahapan-tahapan ketika petugas melakukan sosialisasi, sehingga pada saat pemilihan ada yang salah cara pencoblosan. Menurut ketua tuha peut *Gampong* Lam Ara Cut “sebahagian anggota masyarakat semacam kurang peka terhadap pemilu legislatif, tapi ini bukan berarti mereka tidak ikut memilih, melainkan tidak ikut dalam tahapan atau proses menuju pemilihan, hanya saja mereka tidak mau tau masalah kampanye atau sejenisnya”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh *keuchik Gampong* Lam Ara Cut mengenai kesibukan anggota masyarakat yaitu:

Masyarakat *gampong* kami ada kesibukan tersendiri terutama dalam mencari nafkah untuk kehidupan anggota keluarganya, dan mereka tidak mau disibukkan dengan kegiatan lainnya seperti pemilu. Ini bukan berarti mereka tidak peduli dengan keadaan pemilu legislatif, justru mereka peduli, bahkan diwaktu-waktu tertentu ketika duduk diwarung kopi topik pembicaraannya mengenai pemilu legislatif, ini berarti anggota masyarakat kami peduli tentang pemilu, tapi tidak mau disibukkan dengan berbagai aktifitas pemilu seperti mengimuti sosialisasi dan juga ikut kampanye kemana-mana. Kesibukan anggota masyarakat memang membutuhkan sinergi besar bagi penyelenggara pemilu terutama ditingkat *gampong*. (Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Lam Ara Cut tanggal 30 desember 2016).

Sementara Sekretaris *Gampong* Tumbo Baro mengatakan “sikap apatis sebahagian anggota masyarakat dalam proses pemilihan legislatif sudah menjadi tradisi di tempat kami, dan itu normal sekali karna masyarakat beranggapan yang penting hari pemilu nanti saya datang pilih sesuai dengan keyakinan selesai persoalannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, antara masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut sama-sama memiliki kesibukan tersendiri dan tidak mau focus dengan pemilihan anggota legislatif, namun mereka tetap membicarakan tentang pemilihan pada saat duduk dan minum di warung-warung kopi.

Terbatasnya SDM anggota masyarakat

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam setiap persoalan, namun dalam pelaksanaan pemilu legislatif di *Gampong* Tumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh anggota masyarakat dapat menghambat kelancaran program tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang informan yaitu:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat *gampong* kami dengan sendirinya dapat memperlebat kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif, karena dengan keterbatasan yang kami miliki tentunya berimplikasi pada ketepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan. Namun demikian ini bukan berarti menghambat pelaksanaan pemilu legislatif secara keseluruhan, melainkan pelaksanaan pemilu ditingkat *gampong* perlu bekerja keras dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus sabar dalam melaksanakan tugasnya di karenakan sumber daya anggota masyarakat yang rendah itu bisa berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. (Hasil wawancara dengan tuha peut *Gampong* Tumbo Baro tanggal 30 Desember 2016).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) baik di *Gampong* Tumbo Baro *Gampong* Lam Ara Cut khususnya yang berkaitan dengan pemilihan anggota legislatif sangat rendah, hal itu juga disebabkan adanya perbedaan cara pilih dari tahun ketahun, namun pada saat pemilihan tidak ada persoalan yang berarti karena adanya kesiapan dari panitia penyelenggaraan pemilihan.

Kendala-Kendala Eksternal Yang Dihadapi Kepedulian Parpol

Berkaitan dengan kepedulian parpol dalam meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut cukup representatif. Dengan adanya kepedulian partai terutama dalam mengajak anggota masyarakat untuk proaktif dalam pemilihan sehingga kesadaran pemilih meningkat, baik dari segi keaktifan maupun dari segi kepedulian masyarakat.

Dalam hal ini tentunya parpol punya kepentingan tersendiri untuk memperoleh suara dari rakyat agar mendapat kursi legislatif. Menurut penuturan seorang informan di *Gampong* Tumbo Baro "Dalam pemilu legislatif masyarakat lebih menikmati sebab selain banyak parpol yang turut mengajak anggota masyarakat juga banyak orang yang terlibat baik dia sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai timses dari para caleg.

Sejalan dengan pendapat diatas ketua tuha peut *Gampong* Lam Ara Cut juga memberikan pendapat yang serupa berkaitan dengan keterlibatan atau kepedulian partai politik dalam pemilu legislatif yaitu:

Di *gampong* kami pada saat pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu masyarakat sangat antusias dan senang, meskipun kemampuannya terbatas bisa juga menjadi timses, ada juga yang menjadi agen politik artinya siapa yang ajak dia ikuti, namun belum jelas kemana suaranya diberikan. Bahkan pada saat itu banyak orang yang peduli pada warga kami kami padahal orang tersebut tidak begitu dikenal, masyarakat menggagap kepedulian partai dapat membawa berkah pada masyarakat. (Hasil wawancara dengan tuha peut (Hasil wawancara dengan tuha peut *Gampong* Tumbo Baro tanggal 30 Desember 2016).

Dari hasil penuturan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sikap pro aktif yang dilakukan oleh partai politik maka masyarakat juga merasa sedang berada dalam musim dermawan, orang tidak dikenal saja mau membayar kopi apalagi calon yang sudah dikenal. Dengan adanya keterlibatan Partai politik dan calon dari setiap partai politik memang masyarakat dari kedua *gampong* tersebut baik masyarakat *Gampong* Tumbo Baro maupun masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut lebih antusias dalam proses dan pemilihan.

Dana

Berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam pemilu legislatif selama ini tidak menjadi persoalan, meskipun demikian anggaran memang hal yang sangat diperlukan. Anggaran yang diberikan tentunya sesuai dengan perencanaan dan jumlah personil yang terlibat langsung sebagai panitia pelaksana pemilihan. Kemudian dengan adanya peran baik *Keuchik Gampong* Tumbo Baro maupun *Keuchik Gampong* Lam Ara Cut dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif kegiatan berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan program tersebut. Sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam hal ini.

Berkaitan dengan dana sebagaimana disampaikan oleh informan:

Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif sesuai dengan perencanaan awal dan sesuai dengan jumlah anggota panitia atau jumlah TPS yang ada dalam gampong kami. Berkaitan dengan dana kalau dibilang kurang ya selalu kurang, namun tidak sampai menghambat kelancaran proses pemilihan baik sebelum hari pemilihan maupun pada hari pemilihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 baik di *Gampong* Tumbo Baro maupun di *Gampong* Lam Ara Cut. Hal tersebut sudah disesuaikan dari awal dan dananya sudah diberikan oleh pemerintah melalui panitia pemilihan.

Kepedulian Pemerintah

Berkaitan dengan kepedulian pemerintah dalam pemilu merupakan hal yang wajar, sebab dalam hal pelaksanaan pemilu pemerintah yang bertanggungjawab agar pemilu, khususnya pemilu legislatif bisa terlaksana dengan baik dan berkualitas serta masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. Namun dalam hal ini berkaitan dengan kepedulian pemerintah yang menjadi persoalan adalah terkesan pemerintah selaku penyelenggara pemilu kurang gaung bila dibandingkan dengan partai politik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakilan pemerintah dalam hal ini panitia pelaksana pemilu kalah aktif dibandingkan dengan partai politik. Kalau partai politik tentunya mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk partai masing-masing, karena jika partai politik tidak aktif kan menjadi sia-sia bahkan sudah aktif sekalipun belum tentu mendapatkan tujuan akhir yaitu meraih kursi legislatif, sedangkan pemerintah untuk semua yang penting pemilu legislatif bisa berjalan secara lancar dan berkualitas.

KESIMPULAN

Peran *Keuchik* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014 pada *Gampong* Tumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar berjalan dengan baik dan netral baik dari segi pendidikan politik pada warganya maupun sosialisasi bahkan diskusi dengan melibatkan tokoh politik yang netral. Dalam hal ini secara umum tidak ada perbedaan antara masyarakat *Gampong* Tumbo Baro dengan masyarakat *Gampong* Lam Ara Cut. Hanya saja yang berbeda pada bahagian diskusi dengan tokoh politik, dalam hal ini keuchik gampong tumbo baro lebih berperan.

Kendala yang dialami oleh *Keuchik Gampong* Tumbo Baro dan *Gampong* Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014 berupa keterbatasan kemampuan SDM serta kesibukan anggota masyarakat yang mayoritas petani dapat mengurangi keinginan untuk datang memberikan hak suara ditempat pemungutan suara (TPS). Banyaknya partai politik sebagai peserta pemilu serta banyaknya jumlah surat suara, ditambah lagi dengan jumlah caleg yang begitu banyak menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan pilihan, sehingga dengan sendirinya ada kertas suara yang rusak bahkan ada yang tidak dipilih masih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abu, Nashr Muhammad Al-Iman (2004). *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.

- Achmadi, Abu Narbuko Chalid. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agung, Rosidah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia: konsep, teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badri, Nufal. (2014). Jurnal. *Peran Kiai Dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Kwayar Kabupaten Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura*. Madura: Hilmizan.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bungin, Burhan. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2010). *Sosiologi Organisasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim. (2004). *Konsep kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faturohman, Deden. (2012). *Ilmu Politik*. Malang: UMM Press.
- Ginanjari, Halimun. (2014). Jurnal. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif*. Palembang: Dusturia
- Hendra. (2011). Tesis. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Umum Legislatif di Desa Boloan Kecamatan Langoan Selatan*. Semarang: Pascasarjana Undip.
- Huntington, Samuel P. Joan Nelson. (2010). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy.M. Irfan. (2011). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. (2008). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty dan P3PK UGM.
- Koswara.E. (2007). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Press.
- Kencana Syafii, Inu. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Aksara Baru.
- Martinis. (2010). *Sosiologi Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marijan. (2010). *Partisipasi Politik etit Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Munadjid, Danu Saputra. (2007). *Wawasan Nusantara Dalam Ilmu Politik Dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mustafa, Delly. (2014.) *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pito, Toni Andrianus. Efriza. Fasyah Kemal. (2006). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Rozali, Abdullah. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Raga, Maran, Rafael. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rumpal, Julius. Susanto Marcus. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga belas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rush, Mighael& Philip Althoff. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. (2010). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Salim dan Nurbani. ES. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. (2009). *Otonomi Daerah dalam pembangunan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2012). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Surbakti, Ramlan. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Susilo, Suko, dkk. (2013). *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya.
- Syafiie.Inu. Kencana, Azhari. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafrudin. (2009). *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaiful, Sagala. (2007). *Administrasi Desa suatu pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani. (2009). *Pemimpin dalam organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tanto, Djoko S. (2012). *Revitalisasi Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Stabilitas Politik*. <http://djustanto.blogspot.com/2012-06-01-archive.html>.
- Thoha, Miftah. (2010). *Birokrasi Pemerintahan Indonesi di Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Usman Husaini, Akbar Purnomo Setiady. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2014). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. (2014). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan daerah*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang otonomi Daerah*.